**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam**

Tantangan pembangunan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional(RPJN) Tahun 2005-2025 adalah derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan jatidiri bangsa sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal.

Berdasarkan kondisi umum, tantangan serta permasalahan yang ada, secara umum permasalahan pembangunan kebudayaan serta pariwisata dalam jangka waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. **Urusan Kebudayaan**
2. **Permasalahan Internal**
3. Belum selarasnya perencanaan dan pengembangan kebudayaan antara kabupaten/kota dengan provinsi.
4. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis kebudayaan sangat terbatas.
5. Belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah tentang pelestarian budaya daerah maupun pengembangan budaya daerah.
6. **Permasalahan terkait Pelestarian cagar budaya dan Permuseuman**
7. Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum ditetapkan sehingga belum dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Hal ini terlihat dari belum adanya
8. Pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya masih rendah.
9. Kurangnya perhatian dari masyarakat akan pentingnya penyelamatan benda-benda bersejarah
10. Kesadaran masyarakat yang memiliki benda-benda bersejarah masih rendah untuk melakukan pendaftaran ke instansi kabupaten/kota yang berkepentingan
11. Jumlah Koleksi atau benda-benda bersejarah baik yang berasal dari pembelian dari masyarakat atau hibah hasil tangkapan Aparat hukum belum memiliki tempat penyimpanan yang layak
12. Upaya pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian masih sedikit menjangkau daerah – daerah perbatasan sehingga secara kuantitas SDM di Kota Batam masih sangat sedikit yang telah bersertifikasi
13. **Permasalahan terkait Sejarah dan Tradisi**
14. Terbatasnya bahan informasi tentang sejarah dan tradisi Melayu sebagai alat penguatan karakter dan jatidiri masyarakat Kota Batam.
15. Kurangnya penggalian sejarah dan tradisi-tradisi lokal Kepulauan Riau dan Kota Batam
16. Belum teroptimalnya pengembangan budaya adat melayu sebagai budaya asli di Kota Batam, dimana Kota Batam merupakan kota Multi Etnis.
17. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sejarah.
18. Banyaknya warisan budaya takbenda Kota Batam baik bahasa, adat istiadat, tradisi, maupun kesenian daerah yang belum ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.
19. **Permasalahan terkait Kesenian**
20. Kesenian tradisionalsemakin kurang diminati oleh masyarakat Kota Batam
21. Belum memadainya fasilitas gedung kesenian atau taman budaya di provinsi Kepri sebagai wadah untuk berekspresi, berkreasi dalam pengembangan seni budaya daerah
22. Belum optimalnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya, mitra kebudayaan dalam pelestarian kesenian asli daerah
23. Terbatasnya penyelenggaraan *event* seni dan budaya tingkat nasional dan internasional sebagai usaha melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
24. Kurangya kesadaran generasi muda terhadap seni budaya melayu
25. Kurangnya koordinasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
26. Belum tersedia wadah/tempat pelatihan dan pertemuan bagi para penggiat seni/pelaku seni dalam rangka mengkaji ,menciptakan dan mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan
27. Kurang minatnya masyarakat untuk mempelajari dan menekuni bidang kesenian
28. **Permasalahan terkait Data dan Dokumentasi Kebudayaan**
	1. Belum optimal pengumpulan data kebudayan secara komprehensif dan valid,
	2. Kurangnya pehamanan stakeholder tentang data kebudayaan
	3. kurangnya data kebudayaanbaik secara kepustakaan maupun data kebudayaan dilapangan
	4. Belum adanya sistem pendukung data kebudayaan baik secara offline maupun online
	5. Letak geografis Kota Batam yang terpisah oleh pulau-pulau sehingga mempersulit proses pengumpulan data kebudayaan
29. Belum tertatanya database dan informasi kebudayaan di Kota Batam sebagai penunjang perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas.
30. **Urusan Pariwisata**
31. **Permasalahan Internal**
32. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis Pariwisata sangat terbatas.
33. **Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata**
34. Ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, keamanan, kebersihan, ketertiban destinasi, keterbatasan aksesibilitas, dan hambatan konektivitas, yang membuat jumlah wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau belum optimal.
35. Tidak Semua kelompok sadar wisata mengelola destinasi wisata. Hal ini akan berakibat pada kurang terawatnya destinasi wisata, kurang profesionalnya pengelolaan destinasi wisata, serta eksploitasi berlebihan dari destinasi wisata.
36. Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata Baru.
37. Belum Memadainya Infrastruktur Penunjang Pariwisata yang Berkualitas. Kurangnya infrastruktur untuk menunjang kegiatan kepariwisataan di Kota Batam menjadi kendala dalam mengembangkan dan meningkatkan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) seperti kebutuhan jaringan air bersih dan listrik.
38. Belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan.
39. Daya Saing Produk Pariwisata Yang Masih Belum Optimal, Peningkatan daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesilibitas berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan Industri pariwisata Kota Batam, sedangkan kondisi saat ini ketiga komponen masih dianggap kurang.
40. Kemitraan Usaha Pariwisata Yang Belum Optimal, Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha –usaha ekonomi pariwisata skala Mikro, Kecil dan Menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan
41. Belum maksimalnya Pengembangan Tanggung Jawab Lingkungan Oleh Kalangan Usaha Pariwisata
42. Banyaknya Asosiasi dan Organisasi yang bergerak di bidang pariwisata antara lain seperti ASITA, GIPI, PHRI, yang belum bersinergi dengan program kerja pemerintah sehingga menghambat pengembangan *public-private partnerships.*
43. Dalam menetapkan target pasar wisatawan nusantara dan mancanegara masih belum mengacu kepada riset pasar yang dilakukan secara komprehensif. Penetapan pasar wisatawan mancanegara dan nusantara baru berdasarkan *desk analysis* yang mengambil dari BPS dan sumber-sumber referensi yang akurat antara lain dari Euromonitor, UNWTO, WEF, AC Nielsen, serta sumber – sumber referensi lain yang relevan sehingga belum mencapai pada kedalaman informasi yang diharapkan.
44. *Branding* pariwisata Kota Batam*(Batam Tourism)* masih belum terpublikasikan secara optimal pada berbagai negara pasar utama dan potensial pariwisata Kota Batam, hal ini juga ditimbulkan oleh tidak konsistennya *branding* pariwisata yang digunakan (baru memulai), sehingga *product awareness* dari masyarakat (calon wisatawan) pada negara-negara pasar utama dan potensial terhadap produk dan destinasi pariwisata Kota Batam masih lemah bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia dan negara-negara pesaing Indonesia.
45. Belum efektifnya MoU-MoU kerja sama pemasaran pariwisata yang sudah disepakati antara pihak pemerintah dan juga Asosiasi serta Organisasi yang masih belum berjalan secara baik
46. **Permasalahan Promosi Pariwisata**
47. Beberapa pusat informasi daerah atau destinasi masih belum mampu memberikan informasi menyeluruh kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Batam.
48. Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang mampu memberikan informasi yang menyeluruh baik *online offline* kepada target pasar yang membutuhkan informasi kepariwisatan Kepulauan Riau.
49. Masih terbatas event-event yang berskala nasional dan internasional
50. Belum semua Destinasi Wisata Kota Batam memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk layak dipromosikan baik secara nasional dan internasional.
51. Kurangnya pemanfaatan media dalam pempromosikan pariwisata di Kota Batam
52. Kurangnya optimalnya pemanfaatan Asosiasi Pariwisata untuk promosi, seperti GENPI (Generasi Pesona Indonesia), PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia), ASITA (Asosiasi Travel Agent), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia).
53. **Permasalahan Bidang Ekonomi Kreatif**
54. kurangnya apresiasi kreativitas lokal
55. Rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, dan hak cipta
56. Belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum bankable, *high risk high return, cash flow* yang fluktuatif.
57. Kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standardisasi dan sertifikasi yang belum baik
58. Belum optimalnya pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain kelangkaan bahan baku serta kurangnya riset bahan baku.

**3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Terpilih**

Dalam rangka menjalankan roda Pemerintahan Kota Batam tahun 2016-2021, Walikota dan Wakil kota Batam terpilih telah menetapkan Visi-Misinya kedepan bagi pembangunan dan kemajuan kota Batam yakni :

**”Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”**

Visi tersebut menjadi acuan bagi masing-masing SOPD dalam menetapkan Visi-Misinya guna membuat program kerja kegiatan SOPD.

Adapun misi dari Pemerintah Kota Batam adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi.
2. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera.
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/ perikanan dalam menopang perekonomian daerah
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam

Misi-misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Batam selanjutnya diturunkan menjadi program yang menyangkut kepada semua aspek kegiatan OPD yang ada di Kota Batam. Misi-misi tersebut menjadi pedoman atau pegangan dalam membuat rancangan rencana kegiatan OPD.

**3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepri dan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri**

* **Telaahan Renstra Kementerian PariwisataTahun 2015-2019**

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam bentuk Rencana Strategis Kementerian Pariwisata, Rencana Strategis Kabupaten/ Kota maupun RTRW. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dan linkage dalam pembangunan pariwisata yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pariwisata pada lima tahun mendatang.

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu:

***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut *Nawacita*. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni :

***“Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional Sehingga Bangsa Indonesia Dapat Maju Dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya****”*

Berdasarkan visi Kementrian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementrian Pariwisata 2015-2019 adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional ;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif
4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal

**Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata 2014 – 2019 :**

Berikut adalah sasaran strategis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 2019 – 2021;

1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata
3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata
10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata
11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

Kewenangan pariwisata di level Kementerian memberikan arahan dan kebijakan bahwa pembangunan pariwisata meliputi 4 cakupan komponen yaitu:

1. Destinasi Pariwisata, berkaitan dengan pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, pembangunan fasilitas umum, pembangunan pariwisata serta pemberdayaan masyarakat, secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Pemasaran Pariwisata, berkaitan dengan pemasaran pariwisata bersama terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
3. Industri Pariwisata, berkaitan dengan pembangunan struktur (fungsi, hirarki, hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Kelembagaan Kepariwisataan, berkaitan dengan pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.
* **Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan 7 (tujuh) paradigma pembangunan, dimana urusan kebudayaan tercantum dalam paradigma pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu pendidikan membangun kebudayaan. Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Tujuan dan Sasaran Strategis. Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Urusan Kebudayaan antara lain:

1. Tujuan Strategis (2): Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan.

Sasaran:

1. Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.
2. Tujuan Strategis (5): Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.

Sasaran:

1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.
2. Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia.
3. Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di Kawasan ASEAN.
* **Telaahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Tahun 2015-2019**

Sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riaudan Kepulauan Riau juga telah ditetapkan menjadi salah satu destinasi pariwisata nasional. Sumber daya wisata yang potensial di wilayah ini di antaranya wisata alam, wisata sejarah, dan wisata budaya.

Meskipun perencanaan dan pengelolaan sektor kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau selama ini telah direncanakan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kabupaten/Kota, permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis pengembangan daya tarik wisata di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tetap muncul.

Penentuan Penyusunan Isu strategis dengan menggunakan metode analisis SWOT. Berikut ini isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan di Kepulauan Riau yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesiapan destinasi unggulan daerah untuk bersaing dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur.
2. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang masih belum optimal.
3. Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang dan kemitraan usaha pariwisata belum optimal.
4. Daya saing produk pariwisata yang masih belum optimal.
5. Belum adanya acuan riset pasar yang komprehensif.
6. Strategi komunkasi pemasaran yang belum terpadu.
7. Kegiatan promosi pariwisata masih berjalan parsial.
8. Sumber daya manusia pariwisata yang masih terbatas baik kualitas maupun kuantitas.
9. Penyelenggaraan dan pemanfaatan penelitian yang masih belum optimal.
10. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif.
11. Sarana prasarana belum optimal
12. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri
13. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal
* **Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Tahun 2015-2019**

Tujuan dan sasaran dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2017 – 2021 dengan berdasarkan pada tujuan dan sasaran masing-masing dikemukakansebagai berikut :

1. **Tujuan 1 :**Memperkuat jat diri dan karakter masyarakat kepulauan riau

**Sasaran :**Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya lokal

**Sasaran :**terwujudnya masyarakat yang menghargai sejarah,seni dan Nilai Budaya

1. **Tujuan 2 :** Melestarikan benda,situs dan kawasan cagar budaya Provinsi Kepulauan Riau

**Sasaran :** Meningkatnya Pengelolaan dan pelestarian Nilai sejarah, warisan budaya dan cagar budaya

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

* + - 1. Memberdayakan masyarakat adat dan komunitas budaya melayu, dan mengembangan karakter dan jati diri sejak usia dini melalui pendidikan formal maupun non formal.
			2. Melakukan pendataan dan revitalisasi benda, situs dan kawasan cagar budaya serta icon-icon budaya.
			3. Meningkatkan kerjasama dengan insan kebudayaan dalam promosi, penyelenggaraan event kebudayaan, dan pertukaran pelaku budaya lokal.
			4. Memperbaiki kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan
			5. Meningkatkan Kompetensi SDM Dinas kebudayaan melalui diklat/pelatihan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kajian budaya dan penulisan sejarah lokal Provinsi Kepulauan.
2. Penyusunan dan penyebarluasan buku/naskahsejarah lokal kepada siswa di semua jenjang pendidikan.
3. Pelestarianbenda, situs dan kawasan cagar budaya serta icon-icon budaya.
4. Pembangunan icon-icon karakter budaya melayu Kepulauan Riau.
5. Peningkatan promosi budaya melayu di tingkat nasional dan internasional.
6. Peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan tingkat nasional dan international
7. PenyediaanfasilitasPenunjangkegiatansenibudaya.
8. Peningkatan pembinaan Sanggar Senidan pelaku seni di Kepulauan Riau.
9. Penyusunan renstra dan renja serta pelaporan kinerja dan keuangan yang sinergis, terpadu dan berkelanjutan.
10. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur
11. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sedangkan didalam Renstra Dinas Pariwisata Kota Batam juga terdapat beberapa program kegiatan yang dibedakan dalam urusan sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara lain :

1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar **Urusan Kebudayaan**
2. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya
3. Urusan Pilihan **Urusan Pariwisata**
4. Program Pengembangan Sektor Pariwisata

**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) & Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Rencana Tata Ruang Wilayah kota Batam tahun 2004-2014 disusun berdasarkan Perda Kota Batam no. 2 tahun 2004, sehingga dalam Pengembangan Pembangunan Fisiknya, kota Batam harus berpedoman kepada RTRW kota Batam 2004-2014.Mengacu pada RTRW Kota Batam Tahun 2004-2014 luas Kota Batam adalah 103.843,22 hektar. Luas kawasan lindung Kota Batam sebesar 47.325,27 Hektar atau 45,57% dan luas kawasan budi daya sebesar 56.517,95 hektar atau 54,43%.

Dilihat dari aspek “Urban Design “ dan arsitektur bangunannya, perkembangan fisik Kota Batam belum mampu menampilkan ciri-ciri dan citra kebesaran budaya melayu sebagai identitas kota. Dengan lokasinya yang berada didalam wilayah masyarakat etnis Melayu, sudah selayaknya unsur budaya melayu tampil sebagai unsur dominan dalam menghias wajah kota Batam.

Didalam RTRW kota Batam terdapat beberapa Pemantapan Visi Pengembangan kota Batam yakni :

1. Mewujudkan Kota Batam sebagai kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan investasi dunia yang maju dan menarik di Asia-Pasifik yang dilengkapi prasarana dan sarana pelayanan berstandar internasional
2. Mewujudkan Kota Batam sebagai salah satu pusat kegiatan pelayanan transportasi internasional (Bandar dunia) yang maju dan modern ddi kawasan Asia-Pasifik, dengan pelayanan berstandar internasional
3. Mewujudkan Kota batam sebagai “ daerah tujuan wisata unggulan “ yang berbasis pada wisata alam ( pantai dan perairan laut), wisata budaya,wisata belanja dan wisata konvensi berstandar internasional yang dikelola secara professional.
4. Mewujudkan Kota Batam sebagai pusat pengembangan industri hasil kelautan ( marine product) yang dikelola secara professional, dalam kerangka pemberdayaan ekonomi penduduk lokal yang umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan
5. Mewujudkan Kota Batam yang berkarakter dengan citra kota bernuansa budaya melayu yang tertata rapi, indah, sehat dan berwawasan lingkungan dengan karakter kehidupan masyarakatnya yang berseni-budaya melayu

Didalam beberapa Pemantapan misi pengembangan kota Batam yang terdapat diatas, pada misi ke 4 sangat erat kaitannya dengan bidang pariwisata dan kebudayaan. Yaitu Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alih kapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.

**3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas kebudayaan dan Pariwisata kota Batam disusun berdasarkan analisis terhadap potensi dan permasalahan pembangunan yang ada, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas SDM dalam bidang Budaya dan Pariwisata

2. Perlunya pemasaran pariwisata yang tepat sasaran terhadap peningkatan kunjungan wisatawan

3. Perlunya ditingkatkan pengembangan kesenian dan kebudayan daerah terutama kebudayaan melayu sebagai warisan yang perlu dilestarikan pada generasi penerus

4. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata

5. Peningkatan penataan terhadap objek-objek wisata

6. Peningkatan Kemitraan atau kerjasama pariwisata dengan pihak/daerah lain.

Selain terkenal dengan industrinya kota Batam juga terkenal dengan potensi wisatanya. Hal ini yang menjadikan Batam sebagai kota ke-3 terbesar dalam jumlah tingkat kunjungan wisatawan mancanegara setelah Bali dan Jakarta. Adapun potensi wisata tersebut antara lain :

1. Wisata Budaya (Cultural Tourism)
2. Wisata Bahari ( Marine Tourism)
3. Wisata Olahraga (Sport Tourism)
4. Wisata Belanja (Shopping Tourism)
5. Wisata Sejarah (History Tourism)
6. Wisata Kuliner (Culinary Tourism)
7. Wisata Religi (Religius Tourism)
8. Ekowistata & Wisata Perkebunan (Ecotourism & Agrotourism)
9. Wisata Mice (Meeting *Insentif Convention Exhibition Tourism)*